

# BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Vol. III, Edisi 13, Juli 2018

Antisipasi  
Indonesia  
Terhadap  
Kebijakan  
GSP Amerika  
dan Perang  
Dagang  
Amerika vs  
China

p. 03

Buletin APBN  
Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian DPR RI  
[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
ISSN 2502-8685

Program  
Indonesia  
Pintar:  
Efektivitas dan  
Format Ideal  
Kedepannya

p. 9



9 772502 868006

## Update APBN

p.2

Angka Kemiskinan Per  
Maret 2018

## Dewan Redaksi

### Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,  
M.Si.

### Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

### Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan  
Ratna Christianingrum  
Martha Carolina  
Adhi Prasetyo S. W.  
Rendy Alvaro

### Editor

Dahiri  
Marihhot Nasution

Kritik/  
Saran



[puskajianggaran@dpr.go.id](mailto:puskajianggaran@dpr.go.id)

## Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Perang Dagang Amerika vs China

p.3

PEMERINTAH Amerika Serikat berencana mengevaluasi terhadap 124 produk Indonesia penerima insentif *Generalized System of Preferences (GSP)*. Indonesia tentunya perlu mengantisipasi langkah apa saja yang harus diambil, mengingat Amerika Serikat juga tengah berseteru dengan China. Perang dagang ini tentu saja akan berimbas ke negara-negara lain, termasuk kemungkinan membanjirnya produk buatan China yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi menambah defisit neraca perdagangan yang mampu mempengaruhi postur APBN.

## Program Indonesia Pintar: Efektivitas dan Format Ideal Kedepannya

p.9

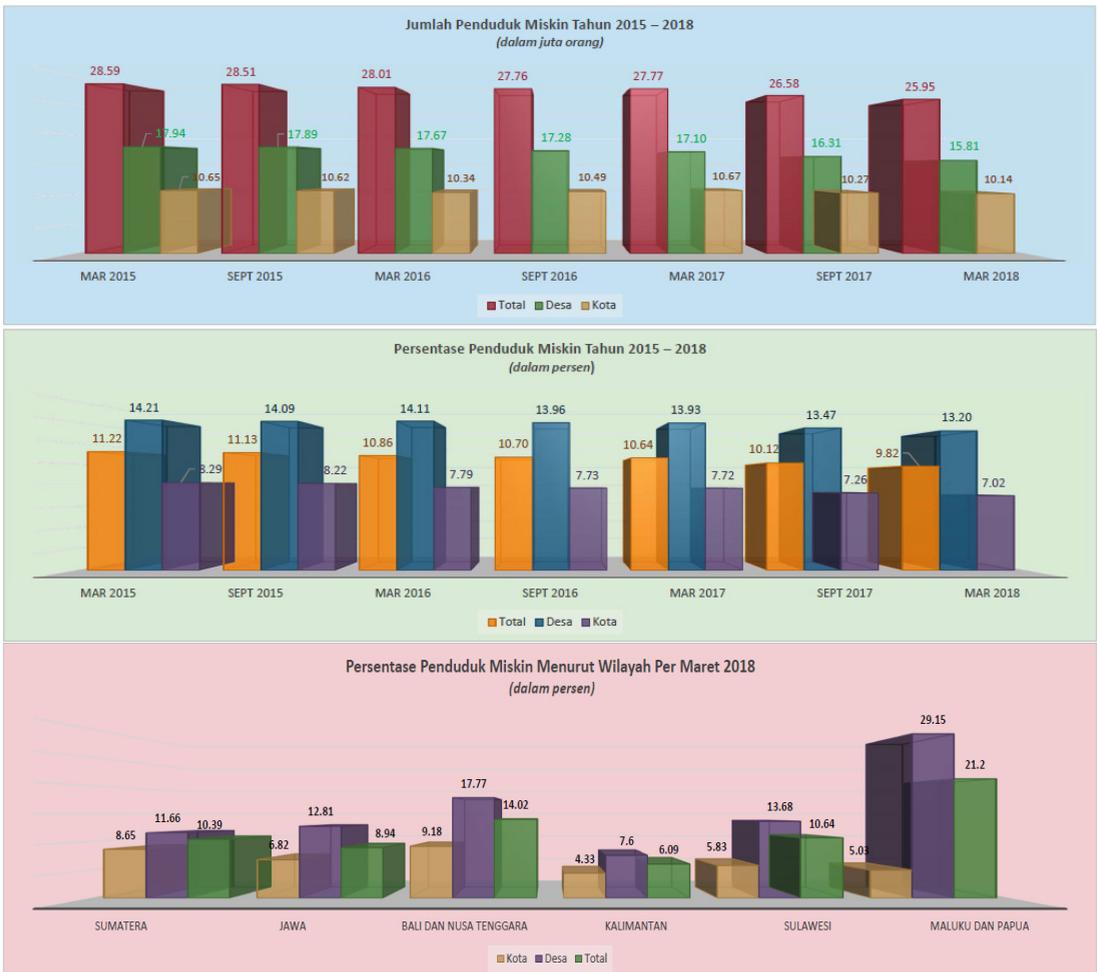
PROGRAM Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu turunan program nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan menengah dan mengurangi angka putus sekolah. Setelah hampir 4 (empat) tahun berjalan, program ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah siswa penerima KIP yang mencairkan dana bantuan, alokasi jumlah siswa penerima manfaat yang relatif tidak sesuai dengan kebutuhan, dan berbagai persoalan lainnya.

# Update APBN

## Angka Kemiskinan Per Maret 2018

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Untuk jumlah penduduk miskin daerah perdesaan, berkurang sebesar 500,4 ribu (13,20 persen) orang dibanding kondisi September 2017 yang sebesar 16,31 juta orang. Sedangkan perkotaan, berkurang sebesar 132,5 ribu orang (7,02) yang sebesar 10,27 juta orang.

Untuk persentase penduduk miskin secara total, hanya wilayah Jawa dan Kalimantan yang persentasenya di bawah akan kemiskinan nasional. Sedangkan wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi serta Maluku dan Papua masih berada di atas angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,82 persen.



Sumber: BPS; 2018, data diolah

# Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Perang Dagang Amerika vs China

oleh  
Adhi Prasetyo S.W.<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Pemerintah Amerika Serikat berencana mengevaluasi terhadap 124 produk Indonesia penerima insentif Generalized System of Preferences (GSP). Indonesia tentunya perlu mengantisipasi langkah apa saja yang harus diambil, mengingat Amerika Serikat juga tengah berseteru dengan China. Hal ini dimulai sejak Presiden Donald Trump menaikkan pajak terhadap setiap barang produksi China yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, China pun melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat. Perang dagang ini tentu saja akan berimbas ke negara-negara lain, termasuk kemungkinan membanjirnya produk buatan China yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi menambah defisit neraca perdagangan yang mampu mempengaruhi postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).*

Mungkin sebagian pembaca bertanya-tanya mengapa kebijakan GSP yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika dan perang dagang antara Amerika dengan China yang berpotensi menambah defisit neraca perdagangan mampu mempengaruhi postur APBN. Sebagai gambaran, defisit neraca perdagangan mampu berimbas terhadap banyak hal seperti pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, Produk Domestik Bruto (PDB) serta indikator ekonomi lainnya yang digunakan oleh Pemerintah dalam menyusun APBN. Apabila Pemerintah tidak segera tanggap menjawab tantangan dari kondisi di atas, bukan tidak mungkin angka yang sudah ditetapkan dalam APBN akan meleset, padahal Pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak mengajukan APBN Perubahan.

### **Kebijakan *Generalized System of Preference* Amerika**

Dalam hubungan dagang internasional dengan negara-negara maju, salah satu fasilitas kemudahan perdagangan yang disediakan bagi eksportir dari negara-negara berkembang adalah GSP. Pada

prinsipnya, GSP adalah sebuah sistem tarif impor di negara-negara maju, yang dikhususkan bagi berbagai produk yang berasal dari negara-negara berkembang dan terbelakang (Pratomo, 2004). Awalnya, fasilitas ini diajukan ke sidang World Trade Organization (WTO) sebagai alat untuk mengatasi adanya ketimpangan daya saing antara negara maju dengan negara berkembang, sehingga negara berkembang diperkenankan menerima kemudahan berupa pengenaan tarif bea masuk yang lebih rendah daripada tarif normal *Most Favoured Nation (MFN)* dari negara-negara maju. Pada perkembangannya, fasilitas ini juga mampu meningkatkan keterbukaan dan kesejahteraan negara-negara berkembang, seperti yang dialami oleh beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar dan Kamboja.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 70-an, fasilitas GSP ini telah diaplikasikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni-Eropa dan Jepang. Umumnya, berbagai produk yang termasuk ke dalam daftar GSP akan dikenakan tarif 0 persen. Selain itu, dalam

<sup>\*)</sup> *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com*

GSP juga terdapat ketentuan terkait berbagai negara penerima fasilitas serta produk apa saja yang diperkenankan memperoleh fasilitas GSP. Hal yang unik dari GSP adalah fasilitas ini masih memberikan kebebasan bagi masing-masing negara yang mengadopsi untuk menentukan negara penerima fasilitas serta daftar produk sendiri, meskipun wajib diadopsi oleh negara-negara maju. Indonesia merupakan salah satu negara penerima fasilitas GSP dari Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspornya.

Sejak tahun 1974, Amerika sudah memberikan fasilitas GSP kepada sekitar 120 negara terhadap 5.000 produk dari total 13.000 jenis produk yang dikenal di Amerika. GSP yang diadopsi Amerika bertujuan mempromosikan nilai-nilai Amerika, termasuk demokrasi dan supremasi hukum. Jadi bisa dikatakan GSP adalah salah satu alat politik luar negeri Amerika untuk menjaga pengaruh dan dominasinya dalam dunia internasional. Setiap bulan Juli, Pemerintah Amerika menerbitkan sebuah Panduan GSP, yang berisikan daftar negara penerima fasilitas serta daftar produk apa saja yang memperoleh fasilitas GSP. Manfaat GSP bagi Indonesia adalah 3.547 produk Indonesia mendapatkan pemotongan bea masuk impor dari Amerika, sehingga produk dari Indonesia mempunyai daya saing di pasar Amerika. Pada tahun 2016, Indonesia mampu mendapatkan potongan US\$1,9 milyar dari total US\$20

milyar ekspor ke Amerika.

Pada bulan Oktober 2017, Amerika melalui United States Trade Representative (USTR) telah mengumumkan proses tiga tahunan untuk menilai kelayakan negara penerima GSP. Periode penilaian pertama mencakup 25 negara di Asia dan Pasifik, yang akan menilai apakah kebijakan dan praktik di negara terkait sudah sesuai dengan 15 kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Kongres. Kemudian, pada tanggal 13 April 2018 USTR juga telah mengumumkan akan melakukan *review* kelayakan GSP terhadap 3 negara yaitu Indonesia, India dan Kazakhstan. Jika *review* atas Indonesia sebelumnya hanya sebatas pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), kini USTR menambahkan dua kriteria penilaian, yakni akses pasar serta jasa & investasi Indonesia terhadap produk dan pelaku usaha Amerika. Apabila hasil dari evaluasi merekomendasikan Indonesia tidak lagi berhak atas fasilitas GSP, maka manfaat dari GSP yang diterima Indonesia saat ini akan dihapuskan segera setelah rekomendasinya ditandatangani Trump pada sekitar November 2018 hingga awal 2019. Di samping melakukan *review* atas kelayakan Indonesia mendapatkan fasilitas GSP, Amerika juga sedang melakukan evaluasi terhadap 124 produk dari Indonesia seperti tekstil, produk hasil hutan, kapas, dan beberapa hasil pertanian dan perikanan, seperti udang dan kepiting. Penerapan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Amerika untuk mengurangi

**Tabel 1. Sepuluh Besar Komoditas Ekspor Indonesia ke Amerika dalam US\$ Ribu**

Tekstil & Produk Tekstil	Amerika	Jepang	China
	3,993.1	1,195.7	742.3
Elektronik	Singapura	Amerika	Jepang
	1,742.7	1,206.8	709.1
Karet & Produk Karet	Amerika	China	Jepang
	1,711.4	1,174.5	933.9
Sawit	India	China	Pakistan
	4,531.1	1,863.7	1,321.7
Produk Hasil Hutan	China	Jepang	Amerika
	2,378.8	1,090.0	908.5
Alas Kaki	Amerika	China	Belgia
	1,218.0	448.6	343.8
Otomotif	Filipina	Thailand	Jepang
	1,645.7	877.9	499.0
Udang	Amerika	Jepang	China
	1,026.7	284.6	42.1
Kakao	Amerika	Malaysia	Belanda
	274.0	155.6	59.3
Kopi	Amerika	Jerman	Malaysia
	239.3	101.1	82.3

Sumber: Kementerian Perdagangan

defisit perdagangan dengan Indonesia. Berdasarkan perhitungan Kementerian Perdagangan, Indonesia mendapat surplus perdagangan dengan Amerika sekitar US\$9,7 miliar pada tahun 2017.

Dari tabel 1, dapat terlihat jelas bahwa Amerika dan China merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia dari segi ekspor non migas. Tercatat Amerika mendominasi sebagai tujuan nomor satu bagi produk tekstil dan elektronik, karet dan produk karet, alas kaki, udang, kakao serta kopi. Sedangkan China menjadi negara pengimpor nomor satu untuk produk hasil hutan Indonesia. Sebaliknya, China selalu berada di belakang Amerika untuk lima dari sepuluh komoditi ekspor utama Indonesia.

Jika hasil review USTR memutuskan penghapusan fasilitas GSP untuk beberapa produk yang merupakan komoditas utama ekspor Indonesia, otomatis bea masuk produk ekspor Indonesia akan dikenakan tarif yang lebih mahal. Pemerintah tentu

perlu memikirkan langkah apa saja yang harus diambil, mengingat delapan dari sepuluh besar komoditas ekspor Indonesia negara tujuannya didominasi Amerika.

### Perang Dagang Amerika dengan China

Selain melakukan evaluasi terhadap neraca perdagangan dengan Indonesia, Amerika juga melakukan hal serupa dengan beberapa mitra dagangnya terutama China. Evaluasi yang dilakukan terhadap China tersebut telah menimbulkan ketegangan antar dua negara yang menguasai pertumbuhan ekonomi dunia. Sebenarnya, perang dagang Amerika dengan China sudah dapat diprediksi semenjak dua tahun yang lalu, dimana Amerika sendiri berupaya mengurangi defisit perdagangannya dengan China yang naik menjadi US\$375,2 miliar pada tahun 2017 dari US\$347 miliar pada tahun 2016. Ditambah lagi selama kampanye kepresidenannya, Trump berjanji untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika terutama dengan China. Hal ini terbukti

**Tabel 2. Sepuluh Besar Komoditas Ekspor Indonesia ke Amerika dalam US\$ Ribu**

No.	Product	Indonesia's Exports to United States of America (USA)		
		Value in 2015	Value in 2016	Value in 2017
	<i>All Products</i>	<i>16.268.488</i>	<i>16.171.284</i>	<i>17.810.363</i>
1.	<i>Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted</i>	<i>1.985.924</i>	<i>1.934.104</i>	<i>2.128.710</i>
2.	<i>Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted</i>	<i>1.716.371</i>	<i>1.679.765</i>	<i>1.996.887</i>
3.	<i>Rubber and articles thereof</i>	<i>1.653.589</i>	<i>1.637.413</i>	<i>1.836.842</i>
4.	<i>Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates</i>	<i>994.849</i>	<i>1.143.655</i>	<i>1.405.584</i>
5.	<i>Footwear, gaiters and the like; parts of such articles</i>	<i>1.267.279</i>	<i>1.296.987</i>	<i>1.333.662</i>
6.	<i>Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal ...</i>	<i>641.690</i>	<i>962.164</i>	<i>1.246.383</i>
7.	<i>Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television ...</i>	<i>1.231.193</i>	<i>1.230.582</i>	<i>1.021.640</i>
8.	<i>Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation bituminous substances; mineral ...</i>	<i>977.593</i>	<i>484.153</i>	<i>692.838</i>
9.	<i>Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; ...</i>	<i>675.763</i>	<i>623.839</i>	<i>687.253</i>
10.	<i>Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; parts thereof</i>	<i>636.426</i>	<i>602.527</i>	<i>674.287</i>

Sumber: Trade Map

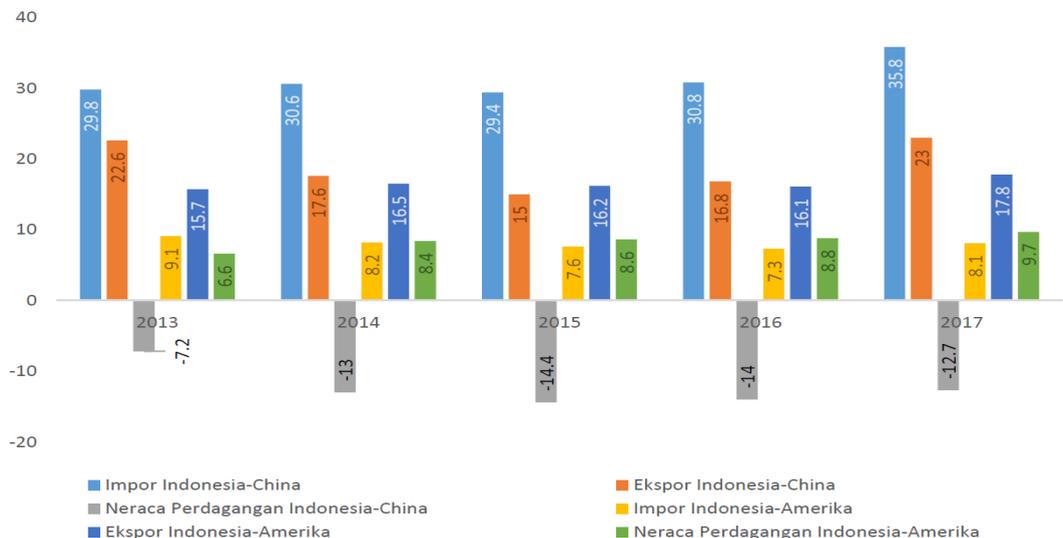
pada tanggal 8 Maret 2018, Trump menandatangani aturan pengenaan bea masuk 25 persen untuk impor baja dan 10 persen khusus produk aluminium. Ia memberikan pengecualian bagi Kanada dan Meksiko dari yang sebelumnya mengatakan akan menerapkan kebijakan itu kepada semua negara tanpa terkecuali. Sebagai balasan atas kebijakan tersebut, China secara resmi mengenakan bea masuk baru terhadap 128 barang impor dari Amerika, termasuk daging babi dan buah-buahan, senilai US\$3 miliar. Penerapan bea masuk baru ini berlaku terhitung sejak 2 April 2018.

Setelah sempat mereda pada bulan Mei, konflik perdagangan Amerika dan China semakin memanas. Di bulan Juni, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan baru sebesar 10 persen atas barang-barang China senilai US\$200 miliar. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan telah meminta Perwakilan Perdagangan Amerika untuk mengidentifikasi produk-produk Tiongkok yang harus dikenakan tarif baru. Dia mengatakan, langkah itu merupakan balasan atas keputusan Tiongkok untuk menaikkan tarif sebesar US\$50 miliar terhadap sejumlah barang-barang Amerika. Ekspor terbesar China ke Amerika adalah bahan baku pesawat, perangkat telekomunikasi dan besi (rel

kereta api). Daging babi, buah dan kacang serta wine merupakan komoditas ekspor terbesar Amerika ke China. Sedangkan impor terbesar Indonesia dari kedua negara di atas adalah besi dan buah-buahan dan kacang.

Jika perang dagang antara Amerika dan China berlangsung terus menerus, maka akan menimbulkan kekhawatiran dari beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, situasi ini diibaratkan dua sisi mata pisau, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positifnya, perang tarif kedua negara ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, dimana Indonesia dapat menggantikan posisi kedua negara tersebut dalam memasok produk ke Amerika dan China. Sisi negatifnya, apabila barang dari China tidak bisa masuk ke Amerika maupun sebaliknya akibat tingginya tarif bea masuk, pastinya China dan Amerika akan mencari tujuan negara baru untuk ekspor produk mereka supaya tidak menimbulkan *over supply* di dalam negeri. Asia Tenggara khususnya Indonesia merupakan pasar yang potensial serta memiliki bea masuk yang murah bila dibandingkan dengan Amerika/China. Sebagai contoh, jika produk besi baja dan aluminium China yang semula untuk pasar Amerika namun kemudian beralih menjadi masuk ke Indonesia, dapat dipastikan akan mengancam industri hulu

**Gambar 1. Perdagangan Indonesia dengan China dan Amerika (dalam US\$ Miliar)**



Sumber: Bank Indonesia

di sektor tersebut di dalam negeri karena susah-bersaingnya dengan harga yang ditawarkan oleh China. Akan tetapi di sisi lain, industri hilir yang menggunakan besi baja tentunya akan diuntungkan karena memperoleh harga yang murah, apalagi proyek infrastruktur yang sempat menjadi program prioritas pemerintah masih banyak yang belum selesai dan ini sangat tergantung terhadap produk impor.

Menurut data BPS, sepanjang tahun 2018, Indonesia sudah mengalami defisit neraca perdagangan sebanyak 4 kali dalam 6 bulan terakhir dengan rata-rata minus US\$1,02 miliar. Pada Januari minus US\$0,68 miliar, Februari minus US\$0,12 miliar, April minus US\$1,63 miliar dan Mei minus US\$1,52 miliar. Sedangkan pada Maret terjadi surplus sebesar US\$1,09 miliar dan Juni sebesar US\$1,74 miliar. Sedangkan berdasarkan data Bank Indonesia, neraca perdagangan Indonesia dengan China pada tahun 2017 mengalami defisit US\$12,7 miliar. Sementara dengan Amerika mencatat

surplus US\$9,7 miliar. Total perdagangan Indonesia dengan China sepanjang tahun lalu mencapai US\$58,8 miliar, terdiri dari impor US\$35,8 miliar dan ekspor US\$23 miliar. Sedangkan perdagangan Indonesia dengan Amerika hanya mencapai US\$25,9 miliar, dengan nilai impor US\$8,1 miliar dan ekspor US\$17,8 miliar.

Yang patut dijadikan catatan, defisit perdagangan Indonesia dengan China pada tahun 2015 melonjak 100 persen dari tahun 2013, menjadi US\$17,4 miliar. Sementara itu, surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika justru mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar US\$8,42 miliar setiap tahunnya. Indonesia harus betul-betul mewaspadaai dampak dari perang dagang Amerika dengan China, agar tidak menambah defisit neraca perdagangan Indonesia sebagai akibat dari defisit neraca perdagangan dengan China bertambah besar sementara surplus yang didapatkan dari Amerika menjadi berkurang.

## Rekomendasi

Kebijakan Trump yang ingin mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika untuk memenuhi janji kampanye pada pilpres melalui evaluasi tarif bea masuk terhadap beberapa negara telah menciptakan ketegangan dengan beberapa negara mitra dagangnya, terutama China. Indonesia tentunya perlu mengantisipasi dan segera berbenah diri serta menentukan langkah apa saja yang harus diambil agar Pemerintah mampu mewujudkan janjinya untuk tidak melakukan perubahan atas APBN 2018. Untuk itu, penulis merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. **Pertama, proses penilaian kelayakan penerima fasilitas GSP dan review produk suatu negara merupakan agenda tahunan USTR.** Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja atase perdagangan yang berada di Washinton DC dan Indonesia perlu memperkuat peran diplomasi perdagangan dan sering melakukan *update* informasi yang terjadi di negara mitra dagang.

**Kedua, diperlukan penjajakan terhadap negara baru tujuan ekspor, setelah memetakan negara mana saja yang membutuhkan produk Indonesia** seperti ke negara-negara Eropa, Australia dan Afrika melalui Forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) maupun perjanjian dagang bilateral antar negara. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu langkah persiapan jika terjadi penurunan nilai ekspor ke Amerika terhadap komoditi utama Indonesia.

**Ketiga, Pemerintah perlu meningkatkan dan memperbaiki tata kelola 19 Indonesia Promotion Center (ITPC) yang tersebar di berbagai negara dalam membangun *networking*,** sehingga mampu mempromosikan komoditas unggulan dan produk Indonesia lainnya yang telah didiversifikasi dengan bantuan Kementerian Perindustrian sehingga mempunyai nilai tambah.

**Keempat, kebijakan proteksi yang dilakukan Amerika seharusnya dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan industri dalam negeri, khususnya industri bahan baku.** Dengan penguatan industri dalam negeri diharapkan produk Indonesia mampu bersaing dengan produk China di dalam negeri maupun di luar negeri baik dari segi harga maupun kualitas. Untuk itu, diperlukan pemberian insentif khusus bagi investor yang ingin berinvestasi pada bidang industri bahan baku di Indonesia, mengingat 74,5 persen dari total impor Indonesia berasal dari impor bahan baku.

**Kelima, pengawasan dan penegakan hukum pada penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)** yang saat ini masih belum banyak dijalankan juga perlu kembali diaktifkan sebagai salah satu wujud kehadiran Pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri.

**Keenam, strategi kebijakan bea masuk anti-dumping bisa juga diterapkan sebagai tindakan preventif untuk mengendalikan derasnya produk China yang masuk ke Indonesia.** Penerapan strategi ini tentu saja dengan memperhatikan kebutuhan dalam negeri khususnya kebutuhan proyek infrastruktur dan industri lain yang bergantung pada bahan impor.

**Ketujuh, mengkampanyekan kembali gerakan bangga dan mencintai produk dalam negeri secara masif.** Dengan kesadaran masyarakat membeli produk dalam negeri, otomatis akan mendorong industri dalam negeri menjadi semakin berkembang dan diharapkan mampu membendung masuknya produk dari negara asing, khususnya China yang kini semakin banyak masuk melalui situs belanja online.

#### Daftar Pustaka

Pratomo, W. 2004. Teori Kerjasama Perdagangan Internasional. Dalam S. Arifin, D. E. RAE, & C. P. Joseph., Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution 2016. Kajian Dampak Kebijakan *United States Generalized System of Preference (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia Ke USA* .Diakses dari: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/4454>

The Office of the United States Trade Representative. 2018. *USTR Announces New GSP Eligibility Reviews of India, Indonesia, and Kazakhstan*.

Detikcom. 2018 Memangnya Ada Perang Dagang AS dengan RI?. Diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4101697/memangnya-ada-perang-dagang-as-dengan-ri>

Katadata. 2018. Trump Ancam Beri Tambahan Tarif untuk Produk Tiongkok US\$ 200 Miliar. Diakses dari: <https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/trump-ancam-beri-tambahan-tarif-untuk-produk-tiongkok-us-200-miliar>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Statistik 10 Komoditi Utama dan Potensial.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). Industri Nasional Perlu Optimalkan Manfaat GSP dari AS

# Program Indonesia Pintar: Efektivitas dan Format Ideal Kedepannya

oleh

Robby Alexander Sirait<sup>\*)</sup>

Ricka Wardianingsih<sup>\*\*)</sup>

## Abstrak

*Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu turunan program nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan menengah dan mengurangi angka putus sekolah. Setelah hampir 4 (empat) tahun berjalan, program ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah siswa penerima KIP yang mencairkan dana bantuan, alokasi jumlah siswa penerima manfaat yang relatif tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai manfaat per siswa yang masih tergolong rendah, angka putus sekolah yang belum sepenuhnya membaik serta pelaksanaan PIP masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan.*

**P**rogram Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu turunan program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2014, dan pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, PIP bertujuan untuk menjamin peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan menengah, menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan, baik di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun di sanggar kegiatan belajar (SKB), dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta mengurangi disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi.

Salah satu kondisi yang melatarbelakangi program ini adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Tingginya biaya pendidikan tersebut menjadi penyebab tingginya angka

tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*). Melalui program ini, Pemerintah berharap mampu mengurangi biaya pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah, yang nantinya berdampak pada penurunan angka putus sekolah.

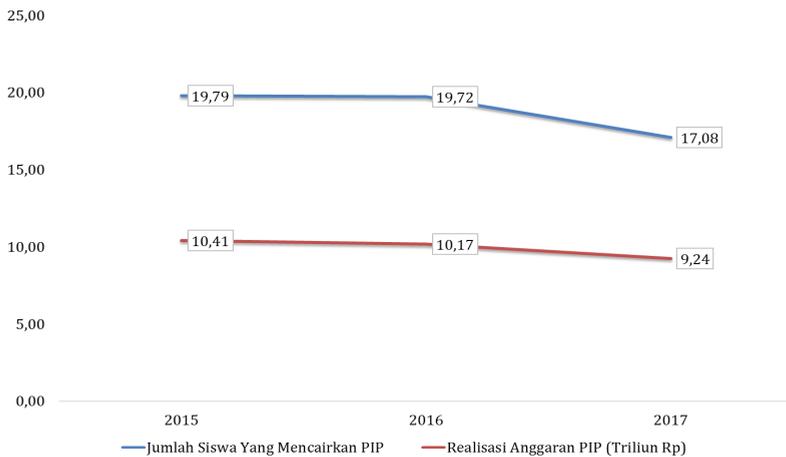
Selain itu, pelaksanaan PIP juga diarahkan sebagai salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan. Melalui program PIP diharapkan aksesibilitas dan capaian tingkat pendidikan masyarakat (khususnya masyarakat miskin) mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang.

Keberhasilan program ini dalam mewujudkan tujuannya, salah satunya sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program. Tulisan ini akan mengurai efektivitas PIP yang sudah berjalan hampir 4 (empat) tahun. Selain itu, tulisan ini juga hendak mengkaji bagaimana PIP yang ideal kedepannya, dikaitkan dengan amanah konstitusi.

<sup>\*)</sup> Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: alexandersirait@gmail.com

<sup>\*\*)</sup> Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rickawardyas@gmail.com

**Gambar 1. Perkembangan Program Indonesia Pintar, Tahun 2015-2017**



Sumber: Kemendikbud & Kemenag, diolah.

### **Realisasi Jumlah Siswa Penerima Manfaat Yang Mencairkan PIP dan Realisasi Anggaran Menurun Setiap Tahunnya.**

Dalam kurun waktu tahun 2015-2017, realisasi PIP mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah siswa penerima manfaat yang mencairkan PIP maupun realisasi anggaran (Gambar 1). Jika membandingkan jumlah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disalurkan dengan jumlah siswa penerima KIP yang mencairkan dana PIP, dalam kurun waktu yang sama juga mengalami penurunan.

Berdasarkan sebaran provinsi pada tahun 2017, ada 11 (sebelas) provinsi yang pencairannya masih di bawah 80 persen. Provinsi Papua Barat (64,05 persen), Papua (67,17 persen), Maluku Utara (72,39 persen), Kalimantan Timur (75,53 persen) dan Kalimantan Tengah (77,50 persen) merupakan beberapa provinsi yang pencairan PIP oleh siswa penerima manfaat masih di bawah 80 persen. Kondisi ini dapat dijadikan indikasi awal bahwa pengelolaan PIP masih belum efektif, mengingat masih tingginya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan siswa penerima manfaat sebanyak 19,7 juta siswa (NK APBN 2018), dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,8 triliun.

### **Pelaksanaan PIP Belum Efektif**

Setelah hampir empat tahun, pelaksanaan PIP masih belum berjalan secara efektif dalam mencapai tujuannya dan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan parameter yang menunjukkan bahwa pengelolaan PIP masih belum efektif. **Pertama, persentase siswa penerima KIP yang mencairkan dana PIP mengalami penurunan drastis di tahun 2017.** Salah satu indikator efektivitas sebuah program dapat diukur dari seberapa jauh atau besar tujuan yang ditargetkan tercapai. Sepanjang tahun 2015-2017, jumlah siswa penerima manfaat yang mencairkan PIP selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, siswa penerima manfaat yang mencairkan PIP sebesar 19,79 juta siswa. Mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 19,72 juta siswa dan 17,08 juta siswa pada tahun 2017. Padahal di sisi lain, jumlah penduduk berusia sekolah (6-18 tahun) yang tidak bersekolah masih relatif masih tinggi. Jumlahnya sekitar 10,06 juta orang pada tahun ajaran 2016/2017. Kondisi yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa pengelolaan PIP belumlah efektif.

Inefektivitas pengelolaan PIP juga terlihat dari penurunan drastis persentase jumlah penerima KIP yang

mencairkan dana PIP yang disalurkan oleh Pemerintah pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Pemerintah menyalurkan KIP kepada 20,05 juta siswa dan yang mencairkan dananya hanya sebesar 17,08 juta siswa atau sebesar 85,23 persen. Capaian ini turun drastis dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 94,64 persen dari 20,83 juta KIP yang disalurkan. Penurunan yang sangat drastis tersebut merupakan indikasi kuat pengelolaan PIP belum efektif. Pandangan bahwa pengelolaan PIP belum efektif tersebut semakin kuat, jika membandingkan capaian realisasi pencairan tersebut dengan masih besarnya jumlah penduduk berusia sekolah dasar hingga menengah (6-18 tahun) yang tidak bersekolah pada tahun 2017, yakni sebesar 9,86 juta orang. Target yang tidak tercapai (pencairan hanya sekitar 85 persen) pada saat masih besarnya jumlah anak berusia sekolah yang tidak bersekolah tersebut juga menunjukkan pengelolaan PIP masih belum efektif.

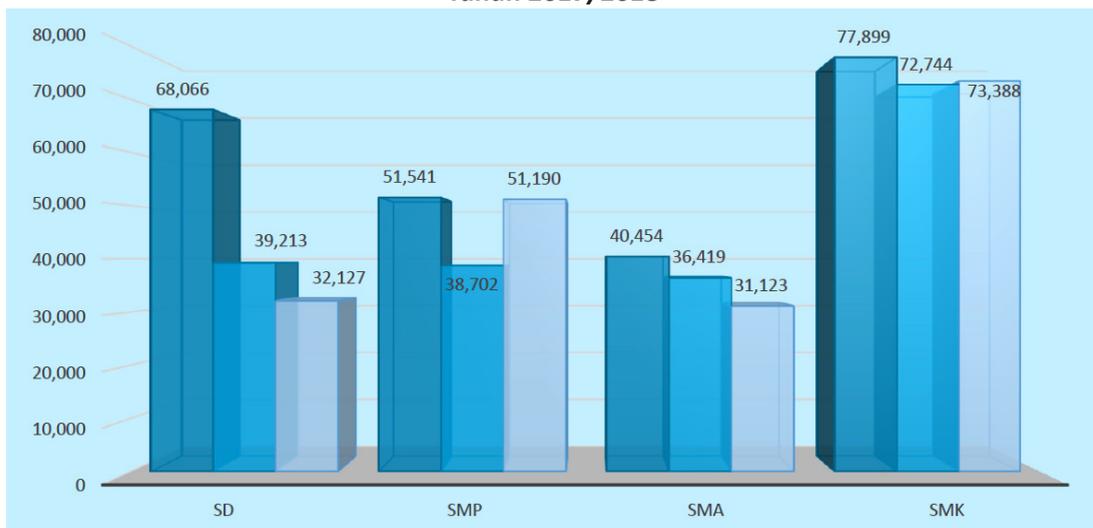
**Kedua, rendahnya alokasi jumlah siswa penerima manfaat PIP untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SMP/SMA/SMK).** Pada tahun 2018, PIP untuk jenjang pendidikan sekolah menengah ditargetkan sekitar 8,7 juta siswa atau setara 44,16 persen dari total target PIP keseluruhan. Tidak jauh berbeda dengan target-target tahun sebelumnya. Di sisi lain, angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan ini masih tergolong rendah pada tahun 2017. Dengan kata lain, jumlah penduduk berusia sekolah (16-18 tahun) yang tidak bersekolah pada jenjang ini masih tinggi. Untuk SMP, APMnya sebesar 78,4 persen dan untuk SMA/SMK sebesar 60,37 persen. Jika kedua jenjang ini diakumulasi, maka jumlah anak berusia sekolah yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah sebesar 8,2 juta orang. Dengan kondisi masih tingginya jumlah anak yang harusnya bersekolah pada jenjang sekolah menengah, idealnya jumlah target

PIP juga harusnya lebih tinggi. Target PIP yang hanya 8,7 juta siswa tersebut menunjukkan penetapan target program ini masih tidak sesuai dengan kondisi atau kebutuhan di lapangan. Ketidaksesuaian ini merupakan indikasi kuat yang menunjukkan pengelolaan PIP belum efektif. Ketidaksesuaian ini pada akhirnya akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan utama PIP, yakni meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

**Ketiga, nilai manfaat per siswa masih terlalu rendah.** Keputusan orang tua untuk menyekolahkan atau melanjutkan tingkat pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sudah pasti akan mempertimbangkan seberapa besar biaya operasional pendidikan, biaya personal pendidikan dan biaya *trade-off* menyekolahkan anak yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Untuk tahun 2018, biaya manfaat yang diterima siswa SD sebesar Rp450.000 per tahun, siswa SMP sebesar Rp750.000 dan SMA/SMK sebesar Rp1.000.000. Artinya, setiap siswa hanya akan terbantu sebesar Rp37.500–Rp83.300 setiap bulan untuk mengurangi biaya personal yang harus ditanggung ketika memilih untuk bersekolah. Jumlah nilai manfaat ini masih terlalu rendah, jika dibandingkan dengan KJP Plus milik Pemerintah Provinsi DKI yang memberikan besaran manfaat sebesar Rp250.000–Rp450.000 per bulan, tergantung jenjang pendidikannya. Jumlah besaran nilai manfaat PIP ini juga terlalu rendah, jika membandingkan nilainya dengan biaya *trade-off* yang harus ditanggung ketika memilih bersekolah dibandingkan bekerja atau di rumah.

**Keempat, angka putus sekolah tidak sepenuhnya membaik.** PIP bukanlah satu-satunya program yang berpengaruh terhadap penurunan angka putus sekolah. Meskipun demikian, perkembangan capaian angka putus sekolah juga dapat dijadikan indikator awal untuk menilai efektivitas pengelolaan PIP. Pada periode 2015-2017, angka putus

**Gambar 2. Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017/2018**



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan

sekolah SD dan SMA mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMK, menurun di tahun 2016 dan naik kembali di tahun 2017. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan PIP belumlah efektif, dilihat dari tidak semua jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

**Terakhir, pelaksanaan PIP masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait penyaluran, pemanfaatan dan pengawasan.**

Efektivitas sebuah program sangat ditentukan pada beberapa aspek. Ketepatan sasaran penerima manfaat, ketepatan waktu pendistribusian dan pencairan serta ketepatan penggunaan merupakan beberapa aspek yang penting dalam memastikan PIP berjalan dengan efektif. Kenyataannya, aspek-aspek tersebut belum terpenuhi. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas pelaksanaan PIP di Kabupaten Kupang, Kabupaten Blitar, Kota Yogyakarta dan Kota Medan menunjukkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Hal ini dilihat dari hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa masih

banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP/PIP (41,9 persen), data yang digunakan untuk program KIP/PIP masih belum akurat, distribusi kartu dan pencairan dana KIP masih bermasalah, dan sebagian besar dana tersebut belum digunakan untuk keperluan pendidikan. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program yang melibatkan partisipasi publik masih belum dijalankan. Padahal, keberhasilan dan efektivitas program PIP juga akan ditentukan oleh pengawasan yang kuat, agar tepat sasaran.

**Format Ideal PIP Ke Depan**

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan akhir agenda prioritas kelima dalam konsepsi Nawa Cita atau RPJMN 2015-2019, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam dokumen pada masa kampanye Pilpres 2014 dan RPJMN 2015 - 2019, program tersebut akan diwujudkan melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Harapan atau cita-cita dari program tersebut sejalan dengan Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana setiap warga

negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya, negara harus hadir dalam memberikan pendidikan kepada setiap warga negara dalam kerangka menghela kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, PIP yang dijalankan oleh Pemerintah sejak 4 tahun lalu belumlah sepenuhnya sejalan dan senafas dengan amanah konstitusi, khususnya Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI.

Dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam konstitusi tegas disebutkan setiap warga negara, tanpa ada pembedaan berdasarkan kelas dan karakteristik tertentu. Artinya, konstitusi mengamanahkan Pemerintah untuk membiayai setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar. Sedangkan program PIP masih melakukan pembedaan,

dimana penerima manfaat masih diklasifikasikan menurut umur (6-21 tahun) dan menurut tingkat kesejahteraannya (miskin atau tidak). Dengan demikian, pelaksanaan PIP sebenarnya belum sepenuhnya sesuai dengan amanah konstitusi.

Pembedaan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kapasitas fiskal keuangan negara saat ini. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, penetapan atau pembedaan secara spesifik terpaksa harus dilakukan oleh Pemerintah. Akan tetapi, Pemerintah juga harus terus mengupayakan terwujudnya wajib belajar 12 tahun bebas pungutan melalui PIP di masa yang akan datang. Artinya, desain pelaksanaan PIP tidak hanya sebatas menargetkan masyarakat warga miskin saja untuk seterusnya. Tapi, melalui PIP harus terwujud pendidikan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan tanpa ada pembedaan. Artinya, PIP diperuntukkan kepada setiap warga negara, tanpa ada pembedaan usia dan tingkat kesejahteraan.

## Rekomendasi

Dalam pelaksanaannya, PIP belum berjalan secara efektif dan belum sepenuhnya ideal sesuai amanah konstitusi. Oleh karena itu, ada beberapa alternatif kebijakan yang harus ditempuh pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Alternatif kebijakan tersebut antara lain: **pertama, melakukan pemutakhiran data yang akan digunakan dalam penentuan target dan penyaluran/distribusi.** Keberhasilan dan efektivitas PIP sangat ditentukan oleh adanya penggunaan data yang valid dan mutakhir, baik pada saat perencanaan, pendistribusian serta monitoring dan evaluasi. Dengan data yang valid dan mutakhir, maka ketepatan target penerima dan realisasi pencairan akan semakin meningkat dan optimal.

**Kedua, penetapan alokasi jumlah siswa penerima manfaat seharusnya lebih disesuaikan dengan kondisi capaian pendidikan di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.** Salah satunya adalah penambahan alokasi jumlah siswa penerima manfaat di jenjang pendidikan menengah yang capaian APM-nya masih rendah dan masih tingginya anak usia sekolah menengah yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usianya.

**Ketiga, melakukan asesmen ulang terhadap nilai besaran PIP per siswa yang masih sangat rendah, dengan mempertimbangkan variabel estimasi biaya**

personal pendidikan dan biaya *trade-off* yang lebih rasional.

**Keempat, melibatkan seluruh stakeholders terkait dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengevaluasian program.** *Stakeholders* yang dimaksud adalah pemerintah daerah, masyarakat, sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Perencanaan dan pelaksanaan program sudah seharusnya menggunakan pendekatan "*participatory*", baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

**Kelima, dalam jangka panjang, Pemerintah sudah harus mendesain dan menjalankan secara bertahap PIP yang akan bermetamorfosa dari hanya untuk masyarakat miskin menjadi pendidikan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan diperuntukkan bagi semua warga negara.**

### Daftar Pustaka

Pemprov DKI Jakarta. 2018. <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/>. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2015-2018

Kementerian PPN/Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

TNP2K. 2014. Program Membangun Keluarga Produktif. Diakses dari <http://www.tnp2k.go.id/program/smart-indonesia-card> pada tanggal 9 Juni 2018.

Rahadian. 2017. Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia. Diakses dari [www.student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/](http://www.student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/) pada tanggal 9 Juni 2018.

Ihsanudin. 2017. Manfaat KIP Terus Dirasakan Pelajar. Diakses dari [www.nasional.kompas.com/read/2017/01/29/17194701/jokowi.manfaat.kartu.indonesia.pintar.terus.dirasakan.pelajar](http://www.nasional.kompas.com/read/2017/01/29/17194701/jokowi.manfaat.kartu.indonesia.pintar.terus.dirasakan.pelajar) pada tanggal 9 Juni 2018.

WartaEkonomi.co.id. 2018. ICW Sebut Program Kartu Indonesia Pintar Salah Sasaran. Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read183344/icw-sebut-program-kartu-indonesia-pintar-salah-sasaran.html> pada tanggal 9 Juni 2018

*“Siap Memberikan  
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN  
Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian DPR RI  
[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635  
e-mail [puskajianggaran@dpr.go.id](mailto:puskajianggaran@dpr.go.id)



9 772502 868006